



Langkah Bersama Intelektua

Jurnal Inovasi dan Pengabdian Masyarakat (JIPM)

Homepage: <https://langkahbersama.id/index.php/jipm>

ISSN: 3123 - 3058 (Media Online)

Volume 2, No 7 September 2026 (Halaman 810-815)

PROSEDUR PENGINPUTAN DATA PEMBAYARAN PAJAK PADA BIDANG KEUANGAN DI DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN (DPRKP) KABUPATEN SERANG

Gisca Yulia Anjani¹, Ahmad Faruq²

Program Studi Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis,
Universitas Pamulang, Indonesia^{1,2}

Email : giscaanjani88@gmail.com¹, dosen03410@unpam.ac.id²

ABSTRAK

Kegiatan ini bertujuan untuk mengetahui prosedur penginputan data pembayaran pajak, dokumen yang digunakan, kendala yang dihadapi, serta upaya yang dilakukan dalam mengatasi kendala pada Bidang Keuangan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DPRKP) Kabupaten Serang. Kegiatan dilaksanakan melalui observasi, wawancara, dokumentasi, dan praktik langsung selama pelaksanaan magang pada bagian Keuangan dan Akuntansi. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa penginputan data pembayaran pajak dilakukan secara bertahap, dimulai dari pemeriksaan kelengkapan dokumen, penginputan data pembayaran, pembuatan e-Billing melalui DJP Online, pembayaran pajak, penginputan NTPN, verifikasi data, scan dan upload kuitansi, hingga pengarsipan dokumen. Dokumen yang digunakan meliputi NPD, SPP, SPM, SP2D, kuitansi, faktur pajak, NPWP, kontrak kerja, serta dokumen pendukung lainnya. Dalam pelaksanaannya masih terdapat kendala berupa gangguan jaringan atau sistem, kesalahan penginputan data, dokumen yang belum lengkap atau tidak sesuai, serta keterbatasan pemahaman terhadap sistem perpajakan elektronik. Upaya yang dilakukan meliputi pemeriksaan dokumen sejak awal, pengecekan ulang data, peningkatan pemahaman penggunaan e-Billing, serta koordinasi dengan pegawai ketika terjadi kendala sistem. Kegiatan ini memberikan pengalaman langsung dalam administrasi keuangan serta meningkatkan ketelitian, kedisiplinan, dan tanggung jawab dalam pengelolaan pembayaran pajak.

Kata Kunci: Penginputan Data, Pembayaran Pajak, e-Billing, DJP Online, Administrasi Keuangan

ABSTRACT

The internship activity aimed to understand the procedure for inputting tax payment data, the documents and data used, the obstacles encountered, and the efforts made to overcome

Article History

Received: 25 September 2026

Reviewed: 29 September 2026

Published: 30 September 2026

Copyright : Author

Publish by : JIPM



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

obstacles in the tax payment data input process. The method used in preparing this report was observation and direct practice during the internship in the Finance Division of the Department of Housing and Settlement Areas (DPRKP) of Serang Regency. The results showed that the tax payment data input process consists of several stages, including checking the completeness of supporting documents, entering tax payment data, creating e-Billing through the Directorate General of Taxes (DJP) Online system, verifying the accuracy of the entered data, making tax payments, scanning and uploading receipts, and archiving documents. The documents used include NPD, SPP, SPM, SP2D, receipts, tax invoices, NPWP, work contracts, and other supporting documents. The obstacles encountered included incomplete supporting documents, errors in data entry, internet or system disruptions, and limited understanding of the electronic tax system. Efforts to overcome these obstacles included checking documents before processing, rechecking the accuracy of entered data, coordinating with related employees, and improving understanding of the e-Billing system. This internship provided practical experience in improving accuracy, responsibility, and skills in financial administration, particularly in the tax payment data input process.

Keywords: *Tax Payment, Data Input, e-Billing, Finance Division, Internship*

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang memiliki dasar hukum dan digunakan untuk mendukung kepentingan negara. Indriastuti, Apriyanti, dan Muthoharoh (2020) menjelaskan bahwa pajak dapat dipandang dari sisi ekonomi sebagai perpindahan sumber daya dari sektor privat ke sektor publik, sedangkan dari sisi hukum merupakan kewajiban yang timbul berdasarkan peraturan perundang-undangan. Ketentuan mengenai pajak juga ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 yang menyatakan bahwa pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang.

Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DPRKP) Kabupaten Serang merupakan perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang perumahan dan kawasan permukiman. Dalam pelaksanaan administrasi pemerintahan, Bidang Keuangan memiliki peran dalam pengelolaan administrasi dan pembayaran pajak atas transaksi yang dilakukan. Proses penginputan data pembayaran pajak perlu dilakukan secara teliti agar transaksi tercatat sesuai dokumen dan informasi keuangan dapat dipertanggungjawabkan.

Berdasarkan kondisi tersebut, kegiatan magang dilaksanakan untuk memperoleh gambaran langsung mengenai tahapan penginputan data pembayaran pajak, dokumen yang digunakan, kendala yang dihadapi, dan upaya penyelesaiannya. Kegiatan magang dilaksanakan pada Bidang Program dan Keuangan, bagian Keuangan dan Akuntansi DPRKP Kabupaten Serang pada 6 Juli sampai 5 Agustus 2026.

Identifikasi masalah dalam kegiatan ini berfokus pada proses penginputan data pembayaran pajak, kelengkapan dokumen pendukung, kesalahan penginputan, gangguan sistem atau jaringan, dan pemahaman terhadap penggunaan sistem perpajakan elektronik. Tujuan kegiatan adalah memperoleh pemahaman mengenai prosedur penginputan, dokumen yang digunakan, kendala yang muncul, serta upaya yang dilakukan untuk mengatasinya.

Manfaat kegiatan ini adalah memberikan pengalaman praktis bagi mahasiswa dalam menerapkan pengetahuan yang diperoleh selama perkuliahan, sekaligus memberikan gambaran mengenai administrasi pembayaran pajak pada instansi pemerintah.

Identifikasi Masalah

Dalam pelaksanaan penginputan data pembayaran pajak pada Bidang Keuangan DPRKP Kabupaten Serang, masih ditemukan beberapa kendala yang dapat memengaruhi kelancaran proses administrasi. Salah satunya adalah dokumen pendukung yang belum lengkap atau belum sesuai, seperti faktur pajak, kuitansi, kontrak kerja, dan NPWP. Selain itu, terdapat kemungkinan kesalahan dalam penginputan data, seperti NPWP, nama wajib pajak, nilai transaksi, tarif pajak, dan kode akun. Oleh karena itu, setiap dokumen dan data perlu diperiksa terlebih dahulu sebelum dilakukan proses penginputan dan pembayaran pajak.

Kendala lainnya berkaitan dengan penggunaan sistem perpajakan secara elektronik, khususnya saat melakukan pembuatan e-Billing melalui DJP Online. Proses tersebut bergantung pada jaringan internet dan kondisi sistem, sehingga apabila terjadi gangguan jaringan atau pemeliharaan sistem, proses penginputan dapat mengalami keterlambatan. Selain itu, pemahaman terhadap tahapan penggunaan sistem juga diperlukan agar penginputan dapat dilakukan dengan benar dan tidak menimbulkan kesalahan yang mengharuskan proses diperbaiki kembali.

Berdasarkan permasalahan tersebut, diperlukan ketelitian dalam memeriksa kelengkapan dokumen dan melakukan verifikasi data sebelum penginputan diselesaikan. Koordinasi dengan pegawai, unit kerja, maupun rekanan juga diperlukan apabila terdapat dokumen yang belum lengkap atau data yang perlu diperbaiki. Dengan adanya pemeriksaan dan koordinasi yang baik, kendala dalam proses penginputan data pembayaran pajak dapat diminimalkan sehingga administrasi keuangan dapat berjalan lebih tertib dan teratur.

Tujuan Kegiatan

Kegiatan ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami prosedur penginputan data pembayaran pajak pada Bidang Keuangan DPRKP Kabupaten Serang, mengetahui dokumen dan data yang digunakan dalam proses tersebut, mengidentifikasi kendala yang dihadapi selama penginputan, serta memahami upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala agar proses administrasi pembayaran pajak dapat berjalan dengan lebih teliti dan teratur.

Manfaat Kegiatan

Kegiatan magang ini memberikan manfaat akademis, praktis, dan institusional. Secara akademis, kegiatan ini menambah wawasan dan pengetahuan mengenai prosedur penginputan data pembayaran pajak serta menjadi sarana bagi mahasiswa untuk menerapkan teori yang telah dipelajari selama perkuliahan ke dalam praktik kerja. Secara praktis, kegiatan ini memberikan pengalaman dalam pemeriksaan dokumen, penginputan data, pembuatan e-Billing, verifikasi, pembayaran, scan dan upload kuitansi, serta pengarsipan dokumen. Bagi institusi, kegiatan ini dapat mendukung kelancaran administrasi keuangan sekaligus mempererat kerja sama antara perguruan tinggi dengan DPRKP dalam pelaksanaan kegiatan magang..

METODE KEGIATAN

Kegiatan dilaksanakan di Bidang Program dan Keuangan, Bagian Keuangan dan Akuntansi, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DPRKP) Kabupaten Serang pada 6 Juli sampai 5 Agustus 2026. Metode kegiatan yang digunakan meliputi observasi, wawancara, dokumentasi, dan praktik langsung selama pelaksanaan magang. Tahap kegiatan diawali dengan observasi terhadap alur administrasi pembayaran pajak dan dokumen yang digunakan, kemudian dilakukan wawancara atau koordinasi dengan pegawai untuk memahami setiap tahapan kerja. Selanjutnya, penulis melakukan praktik langsung berupa pemeriksaan kelengkapan dokumen, penginputan data pembayaran pajak, pembuatan e-Billing melalui DJP Online, verifikasi data, pembayaran pajak, penginputan NTPN, scan dan upload kuitansi, serta pengarsipan dokumen. Dokumentasi digunakan sebagai bukti pelaksanaan kegiatan. Evaluasi dilakukan melalui pengecekan ulang hasil penginputan dan koordinasi dengan pegawai ketika ditemukan kesalahan, dokumen yang belum lengkap, atau kendala jaringan dan sistem.

HASIL DAN PEMBAHASAN

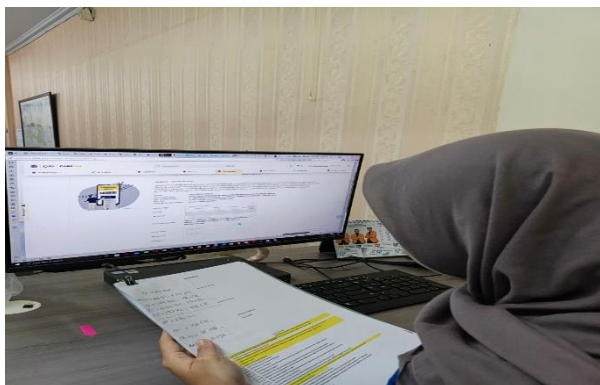
Hasil kegiatan menunjukkan bahwa prosedur penginputan data pembayaran pajak pada Bidang Keuangan DPRKP dilakukan secara berurutan. Proses dimulai dari penerimaan dokumen transaksi, kemudian petugas memeriksa kelengkapan dan kesesuaian identitas rekanan, NPWP, nilai transaksi, serta jenis pajak. Setelah dokumen dinyatakan lengkap, data dimasukkan ke dalam aplikasi pengelolaan keuangan yang digunakan oleh DPRKP. Data yang diinput antara lain nomor dan tanggal transaksi, nama rekanan, NPWP, jenis pajak, dasar pengenaan pajak (DPP), tarif pajak, jumlah pajak, serta kode akun belanja dan kode akun pajak.

Tahap berikutnya adalah pembuatan Kode Billing melalui sistem Direktorat Jenderal Pajak sebagai dasar pembayaran pajak secara elektronik. Setelah pembayaran berhasil, diterbitkan NTPN atau Bukti Penerimaan Negara (BPN). NTPN kemudian diinput kembali ke aplikasi keuangan daerah sebagai bukti bahwa pembayaran pajak telah diselesaikan. Data dan dokumen selanjutnya diverifikasi, kemudian kuitansi dan dokumen pendukung discan serta diunggah dan diarsipkan sebagai bahan pertanggungjawaban keuangan.

Dokumen yang digunakan meliputi Nota Pencarian Dana (NPD), Surat Permintaan Pembayaran (SPP), Surat Perintah Membayar (SPM), Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), kontrak kerja, faktur atau invoice, kuitansi pembayaran, Berita Acara Serah Terima (BAST), faktur pajak, bukti potong pajak, dan NPWP. Dokumen tersebut menjadi dasar untuk memastikan transaksi benar-benar dilaksanakan dan menentukan data serta jenis pajak yang perlu diproses.

Dalam pelaksanaan terdapat beberapa kendala, yaitu gangguan jaringan atau sistem, kesalahan penginputan, dokumen yang belum lengkap atau tidak sesuai, serta keterbatasan pemahaman terhadap sistem perpajakan elektronik. Kendala tersebut dapat menyebabkan proses penginputan tertunda dan memerlukan pemeriksaan atau perbaikan kembali. Untuk mengatasinya, dilakukan pemeriksaan dokumen sebelum proses, pengecekan ulang data dengan dokumen pendukung, peningkatan pemahaman mengenai e-Billing dan penggunaan sistem elektronik, serta koordinasi dengan pegawai apabila terjadi perbedaan data atau gangguan sistem.

Hasil tersebut menunjukkan bahwa ketelitian dan pengendalian pada setiap tahapan menjadi bagian penting dalam menjaga ketepatan administrasi pembayaran pajak. Temuan ini sejalan dengan Mulyadi (2019) mengenai pentingnya pengendalian internal untuk menjaga keandalan informasi akuntansi, serta Muslih (2019) yang menekankan bahwa sistem informasi akuntansi yang berkualitas perlu menghasilkan informasi yang tepat, dapat diandalkan, efisien, mudah diakses, dan terintegrasi.



Gambar 1. Penginputan Pajak Pada Aplikasi DJP online



Gambar 2. Dokumentasi Bersama pegawai DPRKP Divisi Keuangan

KESIMPULAN DAN SARAN

Kegiatan magang pada Bidang Keuangan DPRKP Kabupaten Serang menunjukkan bahwa penginputan data pembayaran pajak merupakan kegiatan administrasi yang dilakukan secara bertahap, mulai dari pemeriksaan dokumen, penginputan data, pembuatan e-Billing, pembayaran pajak, penginputan NTPN, verifikasi, scan dan upload kuitansi, sampai pengarsipan. Dokumen yang digunakan meliputi NPD, SPP, SPM, SP2D, kuitansi, faktur pajak, kontrak kerja, NPWP, dan dokumen pendukung lainnya.

Kendala yang ditemukan berupa gangguan jaringan atau sistem, kesalahan input, dokumen yang belum lengkap atau tidak sesuai, serta keterbatasan pemahaman terhadap sistem elektronik. Upaya yang dilakukan adalah memeriksa dokumen sejak awal, mengecek kembali data yang telah diinput, meningkatkan pemahaman terhadap e-Billing, dan melakukan koordinasi dengan pegawai. Kegiatan magang juga memberikan pengalaman nyata dan melatih ketelitian, disiplin, serta tanggung jawab dalam pengelolaan administrasi keuangan.

Saran yang dapat diberikan adalah meningkatkan ketelitian dalam setiap proses input, melakukan pemeriksaan dokumen sejak awal, meningkatkan pemahaman terhadap sistem perpajakan elektronik, dan memperkuat koordinasi antarpegawai. Bagi mahasiswa magang berikutnya, disarankan lebih aktif mempelajari prosedur kerja dan bertanya kepada pembimbing apabila terdapat pekerjaan yang belum dipahami.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Halim & Muhammad Iqbal. (2020). *Pengelolaan Keuangan Daerah*. STIM YKPN, Yogyakarta.
- Angel Rindorindo, Stevie Kaligis, & J. N. T. (2026). *Analisis Sistem Informasi Akuntansi Dalam Mendukung Kualitas Data Akuntansi Pada PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk Branch Manado*. *EKOMA: Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi*, vol.5 no.5, 6332-6344. <https://doi.org/10.56799/ekoma.v5i5.18713>
- Desi Tanjung, Sahnang Rangkuti, dan A. F. (2023). *Pengaruh Kualitas Pelayanan dan Penerapan Sistem E-Billing terhadap Kepuasan Wajib Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Barat*. *Journal Economic Management and Business*, Vol. 2 No., 361-376. <https://doi.org/10.46576/jfeb.v2i2.4175>
- Direktorat Jenderal Pajak. (2017). *Jejak Pajak Indonesia*. Direktorat Jenderal Pajak, Kementerian Keuangan RI.
- Icha Agnes Saputri, Wiedy Murtini, dan T. M. (2022). *Sistem E-Billing di Kantor Pelayanan Pajak Pratama*. *JIKAP (Jurnal Informasi Dan Komunikasi Administrasi Perkantoran)*, Vol. 5, No. <https://doi.org/10.20961/jikap.v5i4.54664>

- Indriastuti, M., Apriyanti, H. W., & M. (2020). *Perpajakan: Teori dan Kebijakan*. Deepublish.
- Indriastuti, dkk. (2020:27). (2020). *Perpajakan (Teori dan Kebijakan)*. Deepublish (CV Budi Utama).
- Kusmeilia, Cahyaningsih, dan K. (2019). *Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Penerapan Sistem E-Filing dan Penerapan Sistem E-Billing Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak*. *Akuntansi, Sistem Informasi*, 3(3), 364-379.
- Manual, B. (n.d.). *Pembayaran*.
- Mardiasmo. (2018). (2018). *Perpajakan Edisi Terbaru 2018*. CV Andi Offset (Penerbit Andi).
- Maya Indriastuti; Hani Werdi Apriyanti; Muthoharoh. (2020). *Perpajakan: Teori dan Kebijakan*. Deepublish.
- Mulyadi. (2019). *Sistem Akuntansi*. Salemba Empat.
- Nurwahidah. (2026). *DAN PELUANG IMPLEMENTASI E-FAKTUR DAN E-BILLING*. 4(2), 70-81.
- Prof. Dr. Abdul Halim, M.B.A., Akt. & Muhammad Iqbal, S.E., M. S. (2020). *Pengelolaan Keuangan Daerah*. STIM YKPN, Yogyakarta.
- Rd. Amar Muslih. (2019). *Sistem Informasi Akuntansi yang Berkualitas dan Dampaknya terhadap Kualitas Informasi Akuntansi*. *Jurnal Ilmu Akuntansi Dan Bisnis Syariah (AKSY)*, 1(1), 1-12. <https://doi.org/10.15575/aksy.v1i1.4273>
- Rindorindo, Kaligis, dan T. (2026). *Analisis Sistem Informasi Akuntansi Dalam Mendukung Kualitas Data Akuntansi Pada PT Sumber Alfaria Trijaya TBK Branch Manado*. 5(5), 6332-6344.
- Rochmat Soemitro. (1980). *Perpajakan Indonesia*. PT Eresco.
- Rusda Wahyuni Irawati; Ardhila Kamalita Satri. (2017). *Analisis Pelaksanaan Sistem Pengendalian Internal pada Prosedur Penerimaan dan Pengeluaran Barang di PT Unisem Batam*. *Journal of Applied Business Administration (JABA)*, 1(2), 183-193. <https://doi.org/10.30871/jaba.v1i2.609>
- Rusdiana, H. A.; Zaqiah, Q. Y. (2022). *Manajemen Perkantoran Modern*. Bandung: *Insan Komunika*. Insan Komunika, Jurusan Ilmu Komunikasi UIN SGD Bandung.
- Rusdiana, H. A. & Zaqiah, Q. Y. (2022). *Manajemen Perkantoran Modern*. Insan Komunika, Jurusan Ilmu Komunikasi UIN SGD Bandung.
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun*. (2007). 2000.
- Waluyo. (2017). *Perpajakan Indonesia*. Salemba Empat.
- Wau, Marselino, dkk. (2023). *Buku Ajar Pengantar Perpajakan*. Feniks Muda Sejahtera.